



Gelontorkan Rp18 M untuk Makan Siang Gratis



Bone Tercepat Realisasikan Program Prabowo-Gibran

REPORTER ASHARI PRAWIRA
EDITOR RIDWAN MARZUKI

BONE, FAJAR — Pemkab menyediakan 54 dapur umum untuk program makan gratis. Anggarannya Rp18 miliar.

PEMERINTAH pusat memang mendorong program makan siang gratis untuk seluruh sekolah. Selain ditalangi APBN, program ini juga akan bersumber dari APBD.

Seyogianya program besutan Prabowo ini belum memiliki regulasi, hanya saja Pem-

kab Bone telah melakukan proyeksi dan penelitian terhadap implementasinya. Anggarannya telah dimasukkan ke dalam APBD 2025.

"Jadi belum ada regulasi, dan belum ada petunjuk teknis yang turun terkait program makan siang gratis ini," kata Pj

Sekkab Bone yang juga Kepala Dinas Pendidikan Bone, Andi Fajaruddin, Kamis, 24 Oktober 2024.

"Program ini, kan, sudah dimulai pada awal tahun depan, dan merupakan janji kampanye Bapak Presiden. Jadi kita sudah masukkan proyeksi anggaran untuk APBD 2025 itu Rp18 miliar," jelas Fajaruddin.

Penganggaran ini dilakukan setelah dilakukan sosialisasi penyusunan APBD. Daerah juga harus terlibat dalam mendukung program pusat. "Jadi di samping alokasi anggaran yang dipersiapkan lewat APBN, daerah juga ikut," jelasnya.

Total siswa yang ada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten (SD dan SMP) dikalkulasi mencapai sekitar 100 ribu orang. Jika ditambah dengan madrasah dan SMA, maka jumlahnya sekitar 160 ribu siswa. Proyeksi nilai per porsi makan siang mencapai Rp15 ribu.

Belum ada jumlah pasti untuk total anggaran yang digelontorkan untuk program makan siang gratis ini di Bone (gabungan APBN dan APBD). Hanya saja ini sudah bisa diproyeksi jika menghitung jumlah siswa dan dikalikan nilai makan siang Rp15 ribu per porsi.

"Tapi ini belum bisa kita ter-

lalu jauh, karena belum ada regulasi, belum ada petunjuk teknis. Jadi sifatnya itu masih sekadar proyeksi, tapi kita persiapkan," ujarnya.

Disdikdasmen juga akan menyediakan setidaknya sebanyak 54 dapur umum yang tersebar di 27 kecamatan di Bone. Satu dapur akan mengakomodasi sekolah-sekolah di wilayah tersebut.

Berlaku Wajib

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bone Ade Fariq Ashar mengatakan program yang digodok pusat ini akan tetap diperhitungkan oleh Pemkab Bone.

Sebab, sifatnya yang wajib. "Mau tidak mau pasti kita akan laksanakan, karena ini program prioritas nasional," jelasnya.

Soal penganggaran ini, dia akan tetap menunggu juknis. Apakah nantinya akan ada dana sharing atau APBN murni. Yang jelas, daerah akan tetap memprioritaskan program ini jika APBD dibutuhkan membantu.

Apalagi, tujuan dari program ini untuk mendorong penurunan angka tengkes (stunting) dan peningkatan gizi anak. "Sudah ada juga badannya yang dibentuk, ada menkonnya lagi, Menko Pangan," tandasnya. (*)